PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILU DI INDONESIA

Rahmaniah

2010128320006@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Partisipasi masyarakat merupakan penyangga utama sistem politik yang demokratis. Pemilu sebagai instrument utama demokrasi membutuhkan partisipasi yang tinggi dan berkualitas demi terwujudnya demokrasi yang substantif. Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) merupakan indikator dalam sistem demokrasi karena melalui pemilu rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan pilihan politiknya terhadap pemerintahan dan negaranya. Melalui pemilu, rakyat bisa memilih pemimpin bangsa atau wakil rakyat untuk duduk dalam parlemen maupun dalam struktur pemerintahan. Berdasarkan sejarah perjalanan bangsa Indonesia pemilu merupakan upaya nyata dalam mewujudkan tegaknya demokrasi di Indonesia dan merealisasikan kedaulatan di Indonesia dengan 5 (lima) prinsip dasar pemilu yaitu prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (jurdil).

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan suatu bentuk demokrasi yang menjadi sarana bagi masyarakat dalam memilih pemimpin bangsa atau wakil rakyat. Pemilu bisa dikatakan sebagai salah satu sarana dalam demokrasi oleh rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas dan bertanggungjawab untuk mensejahterakan rakyat. Partisipasi politik oleh masyarakat dalam pemilu di dalam Negara demokrasi merupakan indikator dalam pelaksanaan penyelenggaraan kekuasaan Negara tertinggi yang sah oleh rakyat atau kedaulatan rakyat. Konstitusi menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Sebaiknya presiden dan wakil presiden serta legislatif, harus memaknai penyelenggaraan pemilu ini sebagai penyerahan mandat oleh rakyat untuk memegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara. Hal ini berdasarkan UUD NRI Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Adapun berdasarkan UU No. 7

Tahun 2017 pasal 448 ayat 1 tentang Pemilu ditegaskan bahwa pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Poin ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam penyelenggaraan pemilu. Tanpa partisipasi dari masyarakat atau keterlibatan masyarakat sebagai pemilih, maka sesungguhnya pemilu tidak memiliki kedaulatan. Ukuran partisipasi ini bukan hanya sekadar kehadiran pemilih dalam memberikan suara di tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pemungutan suara tetapi juga keterlibatan pemilih pada keseluruhan dalam tahapan pemilu. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pesta demokrasi seperti pemilihan umum. Oleh karena itu masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan pemilu karena masyarakat dan pemilu merupakan satu kesatuan yang utuh yang dimana masyarakat menjadi faktor utama dan penentu jalan suksesnya sebuah pelaksanaan dalam pemilu.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Masyarakat, Pemilihan Umum.

KONSEP MASYARAKAT DAN PARTISIPASI POLITIK

Kata masyarakat berasal dari bahasa arab yaitu musyarak. Masyarakat dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau terbuka. Masyarakat terdiri atas individu-individu yang saling berinteraksi dan saling memiliki ketergantungan antara satu sama lain atau dapat disebut dengan *zoon politicon*. Dalam proses pergaulannya, masyarakat akan menghasilkan budaya yang selanjutnya akan dipakai sebagai sarana penyelenggaraan kehidupan bersama. Oleh karena itu, konsep masyarakat dan konsep kebudayaan merupakan dua hal yang saling berkaitan dan membentuk suatu sistem. Pengertian masyarakat menurut Miriam Budiardjo adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mencapai terwujudnya keinginan-keinginan mereka bersama (Miriam Budiardjo, 2006;39). Menurut pendapat Roucek dan Warren, masyarakat merupakan sekelompok manusia yang memiliki rasa kesadaran bersama, di mana mereka berdiam pada daerah yang sama, yang sebagian besar atau seluruh warganya memperlihatkan adanya adat atau kebiasaan dan aktivitas yang sama (Syani 2005:84) Masyarakat adalah sekelompok individu yang bertempat tinggal dalam suatu daerah tertentu serta dapat berinteraksi dengan individu lainnya dalam kurun waktu

yang cukup lama. Menurut Alvin L. Bertrand, masyarakat adalah suatu kelompok orang yang sama identifikasinya, teratur dalam menjalankan segala sesuatu yang diperlukan bagi kehidupan bersama secara harmonis (Syani 2005). Selanjutnya adapun pengertian masyarakat yang diungkapkan oleh seorang ahli antropologi yaitu R. Linton, menurutnya masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya serta dapat berfikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu (Ahmandi 2006:56).

Miriam Budiarto secara umum mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pemimpin negara baik secara langsung atau tidak langsung sehingga dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya. Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Partisipasi politik menjadi salah satu prinsip mendasar dari *good government*, sehingga banyak kalangan menempatkan partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi 1998. Adapun kata partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *pars* yang memiliki arti bagian dan *capere* yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila kata tersebut digabungkan maka berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara (Soeharno: 2004; 102). Selanjutnya Ramlan Surbakti (Chosilin 2007:150) memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik yaitu sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau yang mempengaruhi hidupnya.

SISTEM PEMILU DI INDONESIA

Pemilihan umum merupakan salah satu wujud dari budaya demokrasi, di mana pemilu adalah bentuk implementasi dari salah satu ciri demokrasi dimana rakyat dalam hal ini secara langsung dilibatkan atau diikutsertakan dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara. Secara konseptual pemilu merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Dalam demokrasi, kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*) merupakan konsep tertinggi yang memastikan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi. Untuk membatasi kekuasaan pemerintahan tersebut, maka harus dilakukan pergantian secara berkala dan secara tertib pula supaya tidak terjadi disharmoni dalam masyarakat. Tujuan utamanya adalah agar terciptanya ketertiban, perdamaian, dan keadilan bagi semua pihak dalam proses pergantian kekuasaan.

Wujud nyata demokrasi adalah pemilu, akan tetapi demokrasi tidak sama dengan pemilu. Dalam penyelenggaraan pemilu ini diperlukan juga penerapan asas-asas pemilu. Asas-asas pemilu yang diterapkan di Indonesia dan menjadi prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemilu telah ditetapkan di dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang meliputi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan asas adil yang dilaksanakan tiap lima tahun sekali. Indonesia sebagai Negara yang menganut faham demokrasi telah memenuhi hak setiap warganya dalam pemilu, yaitu dengan memberikan hak memilih atau hak politik saat pemilu diselenggarakan. Hal ini dituangkan dalam UU No 7 tahun 2017 Bab IV Pasal 198 tentang hak memilih saat pemilu.

SIMPULAN

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, Sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik masyarakat berpengaruh terhadap jalannya suatu pemerintahan. Pada suatu pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap pengambilan keputusan masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki pilihan dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu merupakan hal yang sangat peting, karena masyarakat adalah subjek dari pemilu itu sendiri. Upaya peningkatan partisipasi adalah tanggung jawab bersama antara penyelenggara, peserta

pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Sebuah negara yang demokratis memiliki ciri seberapa besar sebuah negara tersebut melibatkan masyarakatnya dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan pemilihan umum. Karena partisipasi politik masyarakat atau disebut dengan pemilih merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi.

REFERENSI

- Aer, A. Y., Pati, A., & Sampe, S. (2020). PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KECAMATAN TAHUNA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(4).
- Anaada, Z. T. M. (2013). KEKUASAAN NEGARA DALAM STRUKTUR ADAT MASYARAKAT MIANGAS. *JURNAL POLITICO*, 2(2).
- Farisi, M., & Darminto, C. MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU MELALUI ELECTIONTAIMENT. *JURNAL MAJELIS*, 25.
- Rosyadi, I. (2021). *SISTEM PEMILIHAN UMUM INDONESIA DAN AUSTRALIA (Studi Perbandingan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Indonesia Dengan The Commonwealth Electoral 1918 Tentang Pemilihan Umum Australia)* (Doctoral dissertation, UIN SMH BANTEN).
- Subekti, T. (2014). *PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM (Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).